

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini mendalami tentang pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi. Kesimpulan umum dari penelitian ini adalah demokrasi bagi Hatta adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, bukan dari sekelompok intelektual, sekelompok bangsawan, seorang raja, seorang sultan, apalagi seorang diktator, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang kedaulatannya di tangan rakyat, rakyatlah yang menentukan akan seperti apa negara dijalankan, akan tetapi ada suatu hal yang sangat perlu untuk diperhatikan dalam berdemokrasi yaitu pendidikan politik di masyarakat, hak yang dimiliki rakyat untuk menentukan apa yang perlu dijalankan oleh negara akan sia-sia, apabila rakyat tidak memahami makna dari hak yang dimilikinya. Adapun kesimpulan khusus adalah sebagai berikut:

1. Mohammad Hatta berpandangan bahwa kedaulatan atau demokrasi ialah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Ia juga menambahkan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah daripada suatu *kolektivitet* yang melakukan pemerintahan sendiri, kemudian ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki demokrasi yang berasal dari kebiasaan asli kita sendiri, bukan demokrasi barat. Demokrasi di dunia barat adalah demokrasi yang “pincang”, karena hanya demokrasi politik saja, secara ekonomi masyarakat tidak diberi demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi yang akan diimplementasikan di Indonesia adalah Demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi politik dan ekonomi.
2. Demokrasi Indonesia menurut Hatta haruslah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berarti tidak seperti demokrasi yang lahir dari Revolusi Perancis dengan semangat *liberté, égalité, fraternité* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan), yang membuahkan kebebasan politik bagi rakyat dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berbicara, hak-hak individu, mencalonkan diri menjadi pemimpin, dan hak-hak politik lainnya, tetapi kesejahteraan rakyat tidak disertakan dalam pemerintahan saat itu, sehingga

kaum miskin masih tetap miskin paska revolusi dilakukan, dikarenakan yang menggantikan kursi para bangsawan adalah kaum kapital dan orang-orang kaya, sehingga kebijakan pemerintahan sangat berpihak pada kaum kapital dan tidak menguntungkan kaum miskin. Belajar dari hal tersebut, Hatta menegaskan pentingnya demokrasi ekonomi, dimana kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara, sehingga hak-hak ekonomi rakyat harus disediakan oleh negara dan semua yang ada di bumi Indonesia harus dimanfaatkan oleh negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

3. Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak dulu. Sila pertama hingga sila keempat pada hakikatnya merupakan jalan yang mesti ditempuh oleh bangsa Indonesia demi mewujudkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, apabila sila pertama hingga keempat belum dijalankan dengan baik oleh seluruh bangsa Indonesia, maka mewujudkan sila kelima merupakan tujuan yang akan sangat sulit untuk dicapai. Kemudian Hatta juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ia memandang perlunya payung hukum bagi kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka sebagai batasan penguasa dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Hatta sadar betul, tanpa adanya dasar bagi masyarakat mengemukakan pendapatnya, akan berdampak pada kesewenang-wenangan penguasa dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, ia memperjuangkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan tulisan bagi rakyat Indonesia, agar rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat turut serta secara aktif menyumbangkan pemikiran, harapan, serta keinginannya pada negara dengan leluasa melalui mekanisme bernegara yang telah ditentukan.
4. Implementasi pemikiran Hatta dalam pemerintahan dapat kita lihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dan persamaan kedudukan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam otonomi daerah, secara tegas Hatta mengatakan bahwa sia-sia suatu sistem demokrasi tanpa adanya otonomi daerah. Sentralisme dimana kewenangan terdapat di tangan penguasa

eksekutif dan legislatif di pusat tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, oleh karena itu karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus memiliki peran aktif untuk menentukan cara bernegara yang mereka inginkan dengan hak otonomi daerah yang dimilikinya. Otonomi daerah akan terasa sulit pada awalnya karena persaingan tinggi antardaerah akan sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut, tetapi apabila rakyat sudah mulai terbiasa dengan otonomi daerah, pada akhirnya persaingan itu akan menimbulkan kemandirian serta kreativitas dari masyarakatnya untuk membangun daerahnya masing-masing, sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat pada akhirnya diharapkan dapat terealisasi. Persamaan kedudukan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keharusan pada masyarakat Indonesia yang sejak dulu kala merupakan masyarakat yang homogen dengan berbagai macam suku, ras, maupun agama. Oleh karena itu, dibualah aturan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

## **B. Implikasi**

Implikasi yang dapat peneliti sampaikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Pemikiran Hatta memiliki kontribusi yang besar terhadap demokrasi yang kita laksanakan saat ini, Hatta adalah orang yang percaya bahwa kedaulatan harus di tangan rakyat bukan di tangan seorang sehebat apapun orang itu, karena manusia pada akhirnya akan mati, tapi tidak dengan rakyat, rakyat akan selalu ada dari generasi ke generasi, karena itu kedaulatan di tangan rakyat sifatnya abadi dan tidak mungkin disalah gunakan oleh rakyat, karena itu walaupun Indonesia bukan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai individualisme, kekuasaan tetap harus diimbangi dengan hak rakyat untuk mengemukakan keinginannya serta mengevaluasi kinerja pemerintah agar pemerintah sebagai pelayan rakyat tidak menyelewengkan kekuasaan yang ada pada dirinya.

2. Hak asasi manusia di Indonesia adalah buah pemikiran dari para pendiri bangsa kita, yang salah satunya ialah Mohammad Hatta. Ia adalah orang yang percaya bahwa walaupun Indonesia tidak menganut nilai-nilai individualisme, tetapi hak asasi manusia tetap harus di junjung tinggi, agar rakyat tidak kembali terjajah terutama oleh bangsanya sendiri.
3. Mohammad Hatta adalah orang yang berjasa sehingga Indonesia mencakup dari Sabang hingga Merauke, karena saat Pancasila disosialisasikan oleh pemerintah saat itu, orang-orang dari timur Indonesia merasa kecewa dengan isi sila pertama, yang tidak mewakili agama yang mereka anut, Hatta adalah orang yang mengusahakan agar sila pertama diganti demi keutuhan wilayah Negara Indonesia, pada akhirnya isi sila pertama Pancasila menjadi seperti yang kita kenal saat ini dan orang-orang di timur Indonesia menerima isi sila tersebut dan tetap menjadi bagian dari Negara Indonesia.
4. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah pasal yang Hatta perjuangkan ditengah-tengah sebagian para pendiri bangsa yang merasa hak berpikir dan berpendapat pada praktiknya akan mengganggu jalannya pemerintahan dan berbau liberalisme. Hatta percaya bahwa kebebasan berpikir dan berpendapat adalah hak setiap manusia yang harus dilindungi serta menghindari kesewenang-wenangan pemerintah yang sedang berkuasa. Pasal ini juga dibuat agar rakyat dapat mengemukakan kehendak mereka kepada negara sebagai bentuk praktik demokrasi yang telah disepakati para pendiri bangsa saat itu.
5. Mohammad Hatta sudah berbicara pentingnya otonomi daerah untuk keberhasilan demokrasi sejak awal kemerdekaan Indonesia, tetapi otonomi daerah di Indonesia baru terlaksana sepenuhnya saat Indonesia memasuki masa reformasi.

### **C. Rekomendasi**

Rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk Pembuat Kebijakan

- a. Demokrasi yang telah digulirkan saat ini, bagaimanapun tidak mungkin ditarik kembali, akan tetapi dibutuhkan perbaikan dari berbagai macam aspek agar demokrasi yang telah ada mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Pendidikan harus menjadi prioritas utama, bukan saja memperbanyak keberadaan sekolah dan perguruan tinggi, kualitas dari sekolah serta perguruan tinggi harus ditingkatkan agar kualitas sumber daya manusia Indonesia juga dapat ditingkatkan.
- c. Hilangkan praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di pemerintahan, agar pemerintah dapat bekerja dengan baik dan demokrasi dapat terlaksana dengan baik.
- d. Perbaiki supremasi hukum, hukum harus mampu mengakomodir seluruh lapisan masyarakat, agar rasa keadilan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia.
- e. Peningkatan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di seluruh Indonesia.

## 2. Untuk Lembaga Pendidikan

- a. Banyak sekali manfaat yang didapat dari mengkaji pemikiran para tokoh-tokoh perjuangan Indonesia, karena itu lembaga pendidikan harus lebih sering lagi memberikan pengetahuan mengenai tokoh-tokoh tersebut dengan mengintegrasikannya ke dalam buku-buku pelajaran sekolah.
- b. Lembaga pendidikan harus terus meningkatkan jumlah penelitian mengenai pemikiran para tokoh-tokoh Indonesia, terutama yang saat ini belum banyak dikenal masyarakat agar makna perjuangan mereka dapat tersampaikan kepada generasi penerus bangsa.

## 3. Untuk Peneliti Berikutnya

- a. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber kajian keilmuan mengenai konsep demokrasi bagi peneliti berikutnya yang hendak mengkaji konsep demokrasi di Indonesia.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber kajian keilmuan mengenai pemikiran tokoh, khususnya Mohammad Hatta bagi peneliti berikutnya yang hendak mengkaji konsep pemikiran Mohammad Hatta, khususnya dalam demokrasi.

#### 4. Untuk Pemecah Masalah di Lapangan

Demokrasi merupakan suatu sistem kehidupan yang sudah ada di masyarakat Indonesia, bahkan sebelum bangsa ini dijajah, karena itu demokrasi tidak mungkin tergantikan dalam kehidupan bangsa Indonesia, akan tetapi beberapa tahun belakangan ini demokrasi terus tercederai oleh oknum-oknum kelompok yang merasa lebih baik dari kelompok lainnya, karena itu sangat perlu sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran rasa toleransi di tengah-tengah masyarakat dan juga penegakkan hukum yang adil bagi orang-orang yang telah merusak nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

#### 5. Untuk Masyarakat

- a. Dibutuhkan perjuangan yang memakan waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa untuk merebut kemerdekaan seperti yang kita rasakan saat ini, oleh karena itu penting untuk kita sebagai generasi penerus untuk lebih mengenal para pahlawan kita sehingga kita dapat memaknai perjuangan mereka dan tidak menyia-nyiaikan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini.
- b. Indonesia yang merdeka dilahirkan oleh orang-orang hebat sehingga dapat mengusir penjajah yang sudah ratusan tahun mengeksploitasi Nusantara, oleh karena itu kita sebagai generasi penerus juga harus berjuang agar dapat mengisi kemerdekaan yang telah ada ini dengan baik, tidak menyia-nyiaikan perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita dan semakin memajukan Indonesia di kancah dunia internasional.
- c. Demokrasi saat ini sudah kita raih, karena itu perlu bagi kita semua memahami makna demokrasi yang sesungguhnya sehingga demokrasi bisa menjadi instrumen yang baik untuk mempersatukan bangsa dan demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, bukan sebaliknya sebagai pemecah bangsa Indonesia.